



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PADA RESES DI MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 - 2024**

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Dr. HABIBURROKHMAN, S.H., M.H	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/ F-P. GERINDRA
2.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	KETUA KOMISI III/F-PDI PERJUANGAN
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4.	Drs. M. NURDIN, M.M	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
6.	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
7.	Ir. HJ. SARI YULIATI, M.T	ANGGOTA/ F-GOLKAR
8.	Drs. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
9.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
10.	RAHMAT MUHAJIRIN, S.H	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
11.	AHMAD H. M. ALI, S.E	ANGGOTA/F-P. NASDEM
12.	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	ANGGOTA/F-PKB
13.	H. MOH. RANO AL-FATH, S. G., M. H	ANGGOTA/F-PKB
14.	SANTOSO, S. H., M.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
15.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
16.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M. Si	ANGGOTA/F-PKS
17.	NAZARUDDIN DEK GAM, S.H	ANGGOTA/F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

#### IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023 di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
3. Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

### B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

#### I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

##### a. Bidang Anggaran

1. Alokasi anggaran Polda Kepri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp786.465.631.000 dengan penyerapan anggaran sebesar RP593.779.160.016 atau sebesar 75,50%.
2. Data usulan kebutuhan pagu ideal dan defenitif (alokasi Pagu Anggaran) tahun 2023 dan 2024 adalah:

Jenis Belanja	Usulan Ideal 2024	Defenitif 2023 (Rp)	Definitif 2024 (Rp)	Perbandingan Pagu Alokasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	420.666.193.000	412.035.404.000	425.700.658.000	13.665.254	3,32
Belanja Barang	493.065.354.000	322.609.539.000	329.234.085.000	6.624.546.000	2,05
Belanja Modal	326.304.534.000	45.105.406.000	21.299.099.000	-23.806.307.000	-52,78
Jumlah	1.240.036.081.000	779.750.349.000	776.233.869.000	3.516.480.000	-0,45

##### b. Bidang Pengawasan

1. Jenis tindak pidana umum yang ditangani pada tahun 2022 hingga 2023 (s.d September) mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 terdapat total 2.594 kasus tindak pidana dengan penyelesaian kasus sebanyak 1.456 sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2.703 kasus tindak pidana dengan penyelesaian sebanyak 1.791 kasus dan terdapat penurunan sebanyak 109 kasus.
2. Tindak pidana tertentu yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 433 kasus (P19; 131 kasus; P21: 218 kasus; Tahap II: 17 kasus; SP3: 17 kasus; Sidik 28 kasus; Lidik 8 kasus dan 15 limpah). Dimana kasus yang dilimpahkan sebanyak 15 kasus ke Balai Konservasi SDA, DLHK dan BPOM.
3. Kasus tindak pidana narkotika pada tahun 2023 (s.d September) sebanyak 293 kasus dengan tersangka sebanyak 407 orang.
4. Tindak pidana korupsi yang ditangani sebanyak 15 kasus dengan 13 tersangka dan kerugian negara sebesar Rp42.180.805.392.

5. Adapun perkara yang menjadi perhatian publik adalah:
  - a) TPPO
 

Penangkapan dua orang pelaku Balpres/ Baju Bekas pada tanggal 14 Februari 2023 di Gudang Kawasan Industri Tunas 2 Batam
  - b) Narkotika
    - Penangkapan satu orang pengedar narkoba pada tanggal 18 Juli 2023 di Pantai Sagunung Nongsa dengan BB 19.896 gram sabu
    - Penangkapan satu orang pengedar narkoba pada tanggal 24 September 2023 di Jembatan 3 Bulang dengan BB 39.575.8 gram sabu.
  - c) Tindak Pidana UU ITE
    - Penanganan perkara ujaran kebencian yang dilakukan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus yang dilaporkan Pejabat BIN Kepri pada tanggal 29 Oktober 2022 dilaporkan pada Februari 2023;
    - Penangkapan 132 WNA asal Tiongkok atas penipuan online (*Love Scammer*) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Cammo Industrial Park yang bekerjasama dengan Divhubinter dan Kepolisian RRC.
6. Penyelamatan keuangan negara
 

Dari tiga kasus korupsi yang ditangani oleh Jajaran Polda Kepri, terutama di Natuna, Lingga dan Tanjung Pinang keuangan negara dapat diselamatkan sebesar Rp867.157.380.
7. Terdapat 109 kasus perkara yang ditangani dengan keadilan restoratif dengan pembagian 1004 tindak pidana umum dan 5 kasus tindak pidana khusus.

## II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

### a. Bidang Anggaran

1. Total pagu anggaran sebesar Rp86.027.315.000 dengan realisasi sebesar Rp62.876.870.696 atau sebesar 73,09%.
2. Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di wilayah Kepulauan Riau adalah:
  - a) Bidang intelijen: Satgas Mafia Tanah, Program Door to Door (Program Pelayanan Hukum), Asset Tracing di Satker Kejari dan Cabjari tidak ada gangguan.
  - b) Bidang Pidsus: Satgas Mafia Pelabuhan, kegiatan Asset Tracing di Satker Kajari dan Cabjari tidak ada kegiatan dan anggaran.
  - c) Bidang Datun: Program Bantuan Hukum/ penda,pingan hukum terhadap kegiatan kelurahan/ desa, program bantuan masyarakat miskin dan rentan belum ada anggaran
  - d) Bidang Pidum/ barang Bukti: Pemeliharaan barang bukti kapal anggrannya kurang. Alat pemusnah barang bukti berupa Balipres tidak ada anggarannya dan kegiatan asset tracing di Satker Kejari dan Cabjari tidak ada anggaran

### b. Bidang Pengawasan

1. Penanganan perkara dan tipologi kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat antara lain:
  - a) Kejahatan di bidang ekonomi

- Perbankan 1 perkara (BPR Bestari) Tahap Prapenuntutan dengan kerugian negara sebesar Rp5,9 M;
  - Asuransi aset PT. Persero Batam Tahap Prapenuntutan, dengan kerugian negara sebesar Rp 2,3 M
  - PT. Pegadaian Area Batam Tahap Penuntutan, dengan kerugian negara sebesar Rp1,1 M;
  - Dugaan korupsi pengadaan BBM transformasi laut dan sungai Kab. Lingga Tahap Prapenuntutan dengan kerugian negara sebesar RP2M;
  - Tindak pidana pajak tahap pratut (manipulasi data SPT an Bramastho Kusdaryono);
  - Tindak pidana kepabeanan KAYU TEKI 12.000 batan dan minuman beralkohol, tahap penuntutan;
  - Tindak pidana cukai rokok an. Saparudin, tahap prapenuntutan;
  - Tindak pidana perdagangan UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebanyak 11 perkara
- b) Sumber Daya Alam  
Tindak pidana tentang UU No 22 Tahun 2021 tentang Migas diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Ciptajer dan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba sebanyak 21 perkara.
- c) Kelautan dan perikanan  
Tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 14 perkara.
- d) Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker, sebanyak 6 perkara;
  - UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebnayak 10 perkara;
  - UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebanyak 9 perkara;
  - UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau Pasal 17 Ayat 32 UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker sebagaimana mengubah Pasal 69 Ayat 1 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebanyak 1 perkara;
  - Dugaan tindak pidana memasukkan limbah ke wilayah Indoneisa oleh Kapal Blue Sky 1 an Swapnil Jayprakash Narke sudah P21 pada 10 Oktober 2023
- e) Kejahatan Terorganisir (Korupsi, TPPO atau Penyelundupan Barang, TPPU, HAM, Terorisme dan narkoba) yang sedang ditangani:
- Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jembatan merah, Tahap Pratut kerugian negara Rp8,2 M;
  - Tindak pidana korupsi pembangunan polder pengendali banjir, tahap pratut kerugian negara sebesar RP3,3M;
  - Pemerasan oleh ASN dalam tender pengadaan barang dan jasa, tahap penyidikan;
  - Tindak pidana korupsi dan hibah a.n Ari Rosandi, Abdi Surya Rendra dan Triwahyu Widadi, tahap persidangan dengan kerugian negara sebesar Rp1,6M

- Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PNBP jasa pemandu, tahap penyelidikan dengan kerugian negara yang masih menunggu audit BPKP
- f) Kejahatan Narkotika  
Terdapat 420 perkara narkotika se-wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,
- g) Kejahatan TPPO dan Kejahatan Perlindungan Migran Indonesia (PMI)  
Perkara yang sering dibuktikan oleh Hakim adalah tindak pidana PMI walaupun secara alternatif didakwakan juga tindak pidana TPPO, sehingga jumlah perkara TPPO sebanyak 13 perkara dan PMI sebanyak 121 perkara.
2. Penerapan keadilan restoratif sebanyak 37 kasus dan sudah terdapat total 29 Rumah Keadilan Restoratif yang tersebar di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
- a) Perdata
- MoU Perjanjian Kerjasama : 12
  - Litigasi : 18 SKK
  - Non Litigasi : 35 SKK
  - Hak Perwalian Anak : 30 Kegiatan
- b) Tata Usaha Negara  
Bantuan hukum litigasi 1.
- c) Pertimbangan Hukum
- Pendampingan hukum : 201 kegiatan
  - Penegakan hukum : 9 kegiatan
  - Pelayanan hukum : 141 kegiatan
  - Pertimbangan hukum : 215 kegiatan
  - Pertimbangan hukum tanpa permohonan : 2 perkara

### **III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kemenkumham**

#### **a. Bidang Anggaran**

1. Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar Rp254.426.000 yang terbagi kepada 9 DIPA Kantor Wilayah, 11 UPT Pemasarakatan, 9 UPT Keimigrasian, 1 UPT Badiklat. Adapun realisasi anggaran (data per 13 Oktober 2023 Rp182.493.958.140 atau sebesar 71,73%.
2. Adapun kebutuhan anggaran tahun 2024 sebesar Rp288.911.824.000 dengan pembagian Pagu Satker Kantor Wilayah sebesar Rp30.725.587.000, Pagu UPT Pemasarakatan sebesar Rp117.054.680.000 dan Pagu UPT Imigrasi Rp130.292.786.000.
3. Program-Program Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah:
  - a) Pelaksanaan pelayanan internal melalui program dukungan manajemen
  - b) Pengadministrasian Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, Perencanaan Anggaran yang berbasis Kinerja, Peningkatan pelaksanaan reformasi Birokrasi,

Program kehumasan dalam peningkatan citra positif Kementerian Hukum dan HAM, serta pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

- c) Pelaksanaan pelayanan publik pada divisi pelayanan hukum dan HAM
- d) Melalui Layanan Apostile, Layanan Perseroan Perorangan, Penegakan Hukum di bidang Kenotariatan, Pelayanan Kekayaan Intelektual, Penyuluhan serta Bantuan Hukum melalui LBH, Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
- e) Program penegakan hukum keimigrasian di Wilayah Kepulauan Riau
- f) Pelaksanaan TIM PORA, Pembinaan Pngawasan serta Pengendalian Terhadap Satuan Kerja Keimigrasian
- g) Pelaksanaan Pengelolaan Data Pemasarakatan melalui Inovasi Sipewarna dan Simaster
- h) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap satuan kerja Pemasarakatan

## b. Bidang Pengawasan

### 1. Perundang-Undangan

Produk hukum yang telah diharmonisasi sebanyak 100 produk hukum yang terbagi dalam Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Perwako, Ranper DPRD dan lain lain dengan jumlah per daerah sebanyak 108.

### 2. Pemasarakatan

Jumlah warga binaan sebanyak 4.634 dengan pembagian tahanan 645 dan narapidana 3.989. Terjadi over kapasitas sebesar 66%

### 3. Imigrasi

- a) Jumlah perlintasan kedatangan penumpang WNA pada tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau pada periode Januari sampai dengan September 2023 sebanyak 957.784 WNA. Adapun jumlah keberangkatan WNA sebanyak 957.491 WNA.
- b) Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 6927
- c) Jumlah deteni dan pengungsi sebanyak 43
- d) Jumlah pengungsi/ refugee sebesar 739

### 4. Kekayaan Intelektual

- Melakukan Kerjasama dengan Pemda dan Perguruan Tinggi melalui Kerjasama (PKS)/ MoU/ Kesepahaman Bersama melalui:
  - Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat umum
  - Penyelenggaraan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual kepada operator sentra kekayaan intelektual
- Disamping itu pelayanan kekayaan intelektual juga dilakukan melalui kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic) yang telah dilaksanakan 1 (satu) kali bertempat di Kota Tanjungpinang pada Tanggal 16-17 Juni 2023.

- Tahun 2024 pelayanan Kekayaan Intelektual rencana juga akan dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik yang ada di kabupaten/ Kota.
- Pelaksanaan Layanan AHU Online di wilayah.
- Pelaksanaan Layanan bantuan Hukum litigasi atau non litigasi melalui beberapa LBH di Kepri.

#### IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

##### a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan rincian:

Satuan Kerja	Pagu DIPA 01 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	29.014.608.000	16.269.053.632	56,07
Pengadilan Negeri Tanjungpinang	12.637.969.000	10.444.446.079	82,64
Pengadilan Negeri Bintan	10.212.536.000	7.400.853.051	72,47
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	4.786.693.000	3.498.265.552	73,08
Pengadilan Negeri Natuna	5.827.943.000	4.842.142.114	83,08
<b>Total Keseluruhan DIPA 01</b>	<b>62.479.749.000</b>	<b>42.454.760.428</b>	<b>67,94</b>

2. Pagu anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan rincian:

Satuan Kerja	Pagu DIPA 03	Realisasi (Rp)	%
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	117.600.000	80.222.689	68,22
Pengadilan Negeri Tanjungpinang	595.760.000	427.282.291	71,71
Pengadilan Negeri Bintan	409.240.000	328.687.900	80,32
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	115.500.000	88.548.130	76,67
Pengadilan Negeri Natuna	109.828.000	90.488.892	82,39
<b>Total Keseluruhan DIPA 01</b>	<b>1.347.928.000</b>	<b>1.016.229.902</b>	<b>76,31</b>

3. Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan se-Provinsi Kepulauan Riau:

- Gedung kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau masih menggunakan Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang lama karena Gedung masih dalam tahap pembangunan selama dua tahun (multi years), realisasi penyerapan anggaran pembangunan Gedung kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebesar 48,15% atau sekitar Rp9.887.257.103;
- Anggaran untuk sarana dan prasarana Gedung belum teralokasikan;
- Belum adanya fasilitas rumah dinas untuk para ketua, wakil ketua dan para Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- Belum adanya kendaraan dinas untuk Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk kegiatan operasional dan juga rata-rata kendaraan dinas di lingkungan dinas mayoritas sudah berumur 10 tahun;
- Terbatasnya anggaran dukungan manajemen berupa bimbingan teknis bagi tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM;
- Tambahan untuk membiayai kegiatan konsultasi/ koordinasi/ pembinaan/ pengawasan/ sosialisasi/ asistensi/ audit yang dilakukan baik oleh Pengadilan Tinggi sebagai provost Mahkamah Agung RI kepada satuan

kerja di wilayah hukumnya, maupun satuan kerja itu sendiri dalam upaya penyelesaian perkara (sidang keliling, zitting plat;

- g) Tidak adanya tunjangan kemahalan bagi ASN non hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri d wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

4. Kendala-kendala yang dihadapi adalah:

- a) Dari 7 wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau, hanya ada empat pengadilan negeri;
- b) Dari keseluruhan alokasi anggaran yang tersedia sekitar 49,10% adalah belanja gaji pegawai, belanja barang baik operasional dan non operasional sekitar 17,42% dan belanja modal 33,48% dari total seluruh pagu anggaran Tahun 2023;
- c) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk pencapaian optimal kinerja di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, adanya pegawai yang akan memasuki masa purnabakti, sehingga membuat beban kerja bagi masing-masing individu, baik hakim dan pegawai, khususnya pegawai di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan menjadi lebih besar;
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan rusak seperti perangkat PC, printer, perangkat meubelair, sehingga dibutuhkan pembaruan.

5. Rencana strategis dan Program yang akan menjadi skala prioritas di tahun 2024 adalah:

- a) Mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- b) Kenaikan kelas Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pengadilan Kelas IB dan pembentukan Pengadilan Negeri yang baru di wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas;
- c) Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- d) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- e) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

b. Bidang Pengawasan

1. Data penanganan perkara

Satker	2021			2022			2023		
	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
PT Kepri	-	-	-	3	-	3	103	84	24
PN Tanjungpinang	411	412	65	378	391	52	255	263	44
PN Bintan	782	782	0	787	0	0	740	553	187
PN Tanjung Balai Karimun	258	244	45	282	246	81	154	187	48
PN Natuna	43	43	0	75	70	5	68	59	14
Jumlah	1494	1481	110	1525	1494	141	1320	1146	317

2. Perkara pidana yang paling menonjol adalah

- a) Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau: Perkara narkoba
- b) Pengadilan Negeri Tanjungpinang: Perkara TPPO



- c) Pengadilan Negeri Batam: Perkara Narkotika
- d) Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun: Perkara Narkotika
- e) Pengadilan Negeri Natuna: Perkara kejahatan seksual terhadap perlindungan anak

### 3. Data penanganan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Satker	2021			2022			2023		
	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
PN Tanjungpinang	84	84	0	70	70	0	20	15	5
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

### 4. Kendala yang dihadapi bagian pidana

- a) Sarana dan prasarana ruang sidang belum sepenuhnya memadai;
- b) Penyampaian tuntutan yang dilakukan Penuntut Umum yang rentutnya diajukan ke Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung memakan waktu yang cukup lama sehingga penundaan sidang dilakukan berkali-kali dan menjadikan penyelesaian perkara menjadi lama;
- c) Kurangnya tenaga teknis (hakim, panitera muda dan panitera pengganti) dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- d) Sulitnya akses bagi saksi-saksi yang berada di pulau-pulau untuk hadir di persidangan karena kendala transportasi yang mahal dan terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Natuna (Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas), termasuk para Pengasehat Hukum ataupun kuasa hukum yang berada di luar Kabupaten Natuna.

### 5. Data Pelaksanaan Eksekusi Perdata Umum

Satker	2021			2022			2023		
	Masuk	Proses	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
PN Tanjungpinang	4	0	4	6	3	3	7	1	6
PN Bintan	26	26	0	23	23	0	12	12	0
PN Tanjung Balai Karimun	3	3	0	3	3	0	2	1	1
PN Natuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>114</b>	<b>7</b>

### 6. Data Pelaksanaan Eksekusi PHI

Satker	2021			2022			2023		
	Masuk	Proses	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa
PN Tanjungpinang	17	17	0	7	7	0	19	19	0
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

### 7. Data Eksekusi yang BHT namu

Satker	2021			2022			2023		
	Data yang BHT	Berhasil di eksekusi	Belum diekse kusi	Data yang BHT	Berhasil di eksekusi	Belum diekse kusi	Data yang BHT	Berhasil di eksekusi	Belum diekse kusi
PN Tanjungpinang	17	17	0	7	7	0	19	19	0
PN Bintan	26	17	9	23	12	11	12	0	12
PN Tanjung Balai Karimun	3	3	0	3	3	0	2	1	1

PN Natuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	46	37	9	33	22	11	33	20	13

#### 8. Saran

- a) Perlunya penambahan anggaran untuk pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
- b) Penambahan Sumber Daya Manusia/ Aparatur dengan adanya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai Pengadilan Tingkat Banding baru baik tenaga kepaniteraan (tenaga teknis) dan tenaga kesekretariatan untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaga peradilan, dan satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
- c) Penambahan anggaran untuk biaya operasional Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sehubungan dengan kurangnya anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Peradilan;
- d) Pengadaan rumah dinas bagi ketua, wakil ketua dan para Hakim Tinggi serta peraihan rumah dinas di Pengadilan Negeri;
- e) Penambahan anggaran untuk anggaran alat pengolah data dan informasi untuk keperluan berkas perkara, meubelair ruang sidang yang berguna untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan;

### V. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau

#### a. Bidang Anggaran

1. Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau dan Pengadilan Agama se wilayah PTA Kepulauan Riau per 30 September 2023

Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Sisa Anggaran (Rp)
PTA Kepri	29.201.651.000	17.179.232.405	58,83	12.022.418.595
PA Batam	8.431.282.000	6.542.698.655	77,60	1.188.583.345
PA Tanjungpinang	9.006.654.000	4.798.280.181	53,27	4.208.373.819
PA Tanjung Balai Karimun	3.429.244.000	2.984.571.702	87,03	444.672.298
PA Natuna	4.147.630.000	2.857.663.848	68,90	1.289.966.152
PA Dabo Singkep	3.487.214.000	2.328.529.957	66,77	1.158.684.043
PA Tarempa	4.170.434.000	2.536.008.474	60,81	1.634.425.526

#### b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan dan kendala dalam penyelesaian perkara (Perkara eksekusi Tahun 2021-2023) terdapat 12 perkara dengan perkara yang diselesaikan sebanyak 10 perkara (83,33%) dan sisa perkara sebanyak 2 perkara (16,67%).
2. Keadaan perkara tingkat pertama tahun 2021-2023
  - a) Jumlah perkara yang diterima

Tahun	Sisa Sebelum	Jumlah Perkara yang Diterima		Jumlah
		Gugatan	Permohonan	
2021	183	2979	733	4895
2022	106	4266	730	5102
2023	108	3310	531	3949

b) Jumlah Perkara yang diputus

Tahun	Jumlah Perkara yang Diterima		Jumlah	% Sisa Perkara
	Gugatan	Permohonan		
2021	4202	738	4789	3,74%
2022	4264	730	4994	2,08%
2023	2916	501	3417	2,73%

c) Keadaan perkara tingkat banding tahun 2023

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara
2023	0	16	16	0

## VI. Penjelasan Ketua PTUN Tanjung Pinang

### a. Bidang Anggaran

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp5.345.630.000 dengan realisasi sebesar Rp3.701.624.572 (69,25%). Adapun sisa alokasi anggaran sebesar Rp1.644.005.428 (30,75%). Adapun DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI sebesar Rp36.680.000 dengan realisasi sebesar Rp19.070.600 (51,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp17.609.400 (49,01%).

2. Program Prioritas Tahun 2023 adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung yaitu layanan sarana internal (Pengadaan sarana dan prasarana pendukung disabilitas) berupa:

a) Pengadaan sarana pendukung disabilitas

- Kursi roda dengan jumlah 1 (satu) unit
- Alat bantu dengar dengan jumlah 1 (satu) unit

b) Pengadaan prasarana pendukung disabilitas

Jalur disabilitas sepanjang 167 m yang dimulai dari Pos Keamanan menuju kearah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Ruang Sidang Utama, Ruang Tunggu dan Toilet Khusus Disabilitas

3. Adapun kebutuhan Dukungan Anggaran

- a) Renovasi Gedung kantor PTUN Tanjung Pinang;
- b) Pembebasan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT);
- c) Pengadaan sarana fasilitas pelayanan publik;
- d) Pembangunan rumah dinas;
- e) Pengadaan kendaraan dinas/ kendaraan operasional.

### b. Bidang Pengawasan

1. Data penanganan perkara, perkara yang menonjol dan kendala yang dihadapi:

a) Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang pada tahun 2022 menerima perkara gugatan sejumlah 18 perkara dan sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2023 sejumlah 22 perkara

b) Data perkara yang menonjol didasarkan pada jumlah perkara yang banyak masuk dan menarik perhatian masyarakat adalah jenis perkara pertanahan

- c) Secara umum penyelesaian perkara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak mengalami kendala, karena telah dilaksanakan secara eelektronik (e-court), batasan awaktu penyelesaian di tingkat pertama juga telah ditentukan selama 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, hanya saja pihak yang bersengketa terkadang tidak mematuhi court calendar yang telah ditentukan sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama.

2. Data perkara yang sudah Berkekuatan Hukum tetap namun belum dieksekusi tidak ada, dan terakhir perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan sudah dieksekusi adalah perkara Nomor:

Nomor Perkara	Tanggal BHT	Jenis Perkara	Permohonan Eksekusi	Termohon Eksekusi	Keterangan
17/G/2020/PTUN.TPI	30-11-2021	Pertana han	PT. Tria Talang Emas	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Berdasarkan surat keterangan Ketua PTUN TPI No W1-TUN9/260/HK.02.2/IV/2022/tanggal 18 April 2022 sudah dilaksanakan
9/G/2021/PTUN.TPI	19-05-2022	Pertana han	PT. Tria Talang Emas	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Berdasarkan surat keterangan Ketua PTUN TPI W1-TUN9/712a/HK.02.2/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 sudah dilaksanakan

3. Identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak mengalami kendala dalam eksekusi, namun secara praktik dan normatif dapat diidentifikasi permasalahan dalam eksekusi diantaranya, yaitu:
- Perubahan keadaan;
  - Tingkat kepatuhan badan/ pejabat TUN rendah;
  - Tidak ada ketentuan pelaksanaan upaya paksa.

## VII. Penjelasan Kepala BNNP Kepulauan Riau

### a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran BNNP Kepro dan Jajaran TA 2022 adalah:

Satker	Pagu Tahun 2022	Realisasi 2022	Persentase
BNNP Kepri	Rp9.920.184.000	9.809.368.357	98,88%
BNN Kota Tanjungpinang	Rp1.911.408.000	1.901.755.571	99,50%
BNN Kota Batam	Rp1.1755.816.000	1.735.304.694	98,83%
BNN Kabupaten Karimun	Rp2.204.825.000	2.202.672.441	99,90%

2. Anggaran BNNP Kepri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.923.629.000. mengalami blokir sebesar Rp986.693.000. sisa pagu efektif sebesar

Rp9.936.936.000 dengan realisasi sebesar Rp7.124.644.146 atau sebesar 72%.

3. BNNK Batam Tahun Anggaran 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp1.932.052.000 dengan realisasi sebesar Rp1.380.532.804 atau sebesar 71,45%. BNNK Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp2.146.580.000 dengan realisasi sebesar Rp1.640.814.169 atau sebesar Rp76,44%. BNNK Karimun Tahun Anggaran 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp2.134.021 dengan realisasi sebesar Rp1.711.765.687 atau sebesar 80,21%.
4. Program Prioritas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kepri Tahun 2023 adalah:
  - a) Membentuk dan memperkuat desa/ kelurahan bersinar (bersih narkoba) sebanyak 2 (dua) desa dengan anggaran Rp70.000.000 pada DIPA BNNP Kepri Tahun Anggaran 2023.
  - b) Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Dimana tercapai 10 keluarga dengan anggaran Rp40.000.000.
  - c) Pelaksanaan program pelatihan softskill di SMP dan SMU sederajat. Anggaran terhadap 2 sekolah sebesar Rp30.550.000.
  - d) Fasilitasi program pemberdayaan alternatif pada kelompok masyarakat kawasan rawan peredaran gelap narkoba sebanyak 1 kelompok masyarakat rawan dengan anggaran Rp105.200.000
  - e) Pembentukan penggiat P4GN telat tercapai 40 penggiat dengan anggaran Rp99.456.000.
  - f) Pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi P4GN. Terdapat 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp142.798.000.
- b. Bidang Pengawasan
  1. Data perkara kejahatan narkoba yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 20 LKN dan pada tahun 2023 sebanyak 22 LKN. Dengan kebanyakan kasus narkoba adalah jenis sabu. Upaya pemberantasan yang dilakukan adalah:
    - a) Penindakan kasus peredaran gelap narkoba dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
    - b) Kerjasama dengan aparat penegak hukum lain seperti Polda dan Bea Cukai menggunakan peralatan IT seperti Direction Finder (DF);
    - c) Dalam menindaklanjuti korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dilaksanakan melalui pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dimana pelaksanaan Asesmen Terpadu ini berangkat dari kondisi bahwa jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba di Lapas sudah overload, sehingga penanganan perlu dikedepankan dengan menitikberatkan aspek rehabilitasi.
  2. Adapun kendala dalam pelaksanaan TAT adalah biaya transportasi bagi perangkat yang terlibat dalam Tim Asesmen Terpadu. Misalnya anggota tim medis/ tim hukum dari Natuna/ Anambas membutuhkan transportasi ekstra untuk menghadiri rapat Tim TAT.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 ke Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mendukung penambahan anggaran terhadap biaya perjalanan dan fasilitas pada tiga lingkungan Pengadilan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Komisi III DPR RI mendorong Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kepulauan Riau untuk lebih fokus dan ketat dalam pengawasan dan penanganan terhadap orang asing yang masuk ke dalam wilayah NKRI.
3. Komisi III DPR RI mendorong Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk fokus dalam mengawasi pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa
4. Komisi III DPR RI mendukung profesionalisme Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam menangani kasus Rempang.
5. Meminta BNNP dan Aparat Penegak Hukum terkait agar tidak fokus dalam melakukan penindakan terhadap para korban, namun kepada pelaku, pengedar dan bandar narkoba.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses  
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**Ttd.**

**Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.**  
**A-77**